

BAB 3

IDENTITAS FINLANDIA SEBAGAI *PEACEMAKER*

Bab ini akan memaparkan lebih lanjut tentang identitas peran Finlandia. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Finlandia mendapatkan identitas perannya sebagai *peacemaker*. Bab ini membahas sejarah awal Finlandia memainkan peran yang berhubungan dengan *peacemaking*, tokoh-tokoh yang mencetuskan identitas Finlandia sebagai negara *peacemaker*, dan contoh kasus yang menonjolkan identitas Finlandia sebagai *peacemaker*.

3.1 Awal Kebijakan *Peacemaking* Finlandia

Kegiatan *peacemaking* yang dilakukan oleh Finlandia pertama kali tercatat tahun 1963, ketika Sekretaris Jenderal PBB U Thant memilih diplomat Finlandia bernama Sakari Tuomioja sebagai representatif PBB dalam mediasi konflik antara Turki dan Yunani (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2010). Konflik antar dua negara tersebut disebabkan oleh sengketa wilayah Siprus yang dahulunya di bawah kekuasaan Inggris yang kemudian menjadi negara independen pada Agustus 1960. Yunani menentang kemerdekaan Siprus berdasarkan sejarah geografis dan jumlah etnis Yunani yang bermukim di Siprus, yang disusul oleh pertentangan dengan Turki berdasar sejarah Siprus di bawah kepemimpinan Kekaisaran Turki Ottoman sebelum Inggris tiba. Sengketa tersebut juga telah menyebabkan beberapa konflik bersenjata di Siprus antara Turki dengan Yunani (Kyle, 1984).

Sengketa wilayah tersebut awalnya belum dapat diselesaikan hingga PBB turun tangan pada tahun 1963. Sakari Tuomioja setuju mengemban tugasnya sebagai mediator walaupun sebagian dari anggota parlementer Finlandia tidak setuju. Alasan Sakari Tuomioja setuju untuk ikut terlibat dalam *peacemaking* konflik Siprus dikarenakan ia ingin Finlandia menjadi negara yang benar-benar netral terhadap pengaruh Uni Soviet dan Amerika Serikat, lebih terbuka terhadap hubungan internasional, serta berpartisipasi penuh terhadap kegiatan internasional. Tujuan-tujuan dari Sakari saat itu masih sangat ditentang dalam negaranya sendiri. Selain itu pengalaman dia sebagai perwakilan Finlandia dalam negosiasi perdamaian dengan Uni Soviet setelah Perang pada tahun 1948 turut berperan, dimana Finlandia masih mengalami lebih banyak pengaruh Soviet dalam berbagai aspek meskipun telah memiliki status netral. Hal itu ditambah dengan pengalamannya sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1952 ketika kondisi perpolitikan Finlandia masih tertutup dengan negara-negara di luar Nordic (Tuomioja, 2003).

Sebagai perwakilan dari PBB dan mediator, Sakari melakukan mediasi dengan cara membuat jadwal rutin perundingan antara representatif pemerintah Turki, Yunani, Siprus, Amerika Serikat, Inggris dan PBB secara rutin serta mengadakan referendum kepada rakyat Siprus apabila keempat pihak yang berada dalam pertemuan sudah mencapai kata kesepakatan. Perundingan itupun dilakukan secara bertahap sebelum memusatkan kepada perundingan khusus antara Turki dan Yunani dikarenakan begitu banyak aktor negara yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam konflik bersenjata di Siprus (Tuomioja, 2003).

Meskipun hanya satu tahun melaksanakan tugas sebelum Sakari Tuomioja wafat pada September 1964, langkah mediasi yang dicetuskan olehnya tetap dilanjutkan oleh Galo Plaza selaku pengganti mediator. Konflik antara Turki dan Yunani dapat diakhiri pada tahun 1977 dengan hasil Siprus tetap menjadi negara independen berdasarkan hasil perundingan serta referendum dari rakyat Siprus (United Nations Mediator on Cyprus, 2012).

Selain itu Finlandia juga berpartisipasi dalam menengahi perang di wilayah selatan Afrika¹ pada tahun 1977 baik dalam bidang *peacekeeping* maupun *peacemaking*. Dalam bidang *peacekeeping*, Finlandia mengirimkan Duta Besar Finlandia Martti Ahtisaari sebagai Komisaris PBB di Namibia, dimana ia bertugas untuk mengawasi kegiatan *peacekeeping* PBB di Namibia. Proses *peacekeeping* kemudian berjalan lancar saat akhirnya pemerintah Afrika Selatan dengan kelompok separatis PLAN dan FNLA mau melaksanakan gencatan senjata dan siap melakukan perundingan pada tahun 1979. Sehingga pada tahun 1981, Ahtisaari diangkat oleh PBB sebagai perwakilan Sekretariat PBB dalam mediasi konflik antara pemerintah Afrika Selatan dengan kelompok separatis PLAN dan FNLA. Perundingan berlangsung lama dikarenakan beberapa kali terjadi pelanggaran gencatan senjata, namun akhirnya pada tahun 1990 perundingan membuahkan hasil, dimana Namibia kembali mendapat status sebagai negara merdeka, dan

¹ Konflik Perang Kemerdekaan Namibia melibatkan antara pemerintah Afrika Selatan dengan kelompok separatis *People's Liberation Army of Namibia* (PLAN) yang menginginkan kemerdekaan wilayah Namibia dari Afrika Selatan dimana sebelumnya Namibia dianeksasi oleh Afrika Selatan pada tahun 1922 setelah sempat merdeka dari kolonialisasi Jerman. Konflik ini pula menyebar dengan cepat dan menyebabkan wilayah utara dari Namibia (yang sekarang menjadi sebuah negara bernama Angola) juga ikut serta ingin lepas dari wilayah Afrika Selatan dengan mendirikan *Front for the Liberation of Angola* (FNLA), menyebabkan terjadinya perang besar di wilayah selatan Afrika dari tahun 1966 hingga tahun 1990 (Herbstein & Evenson, 1989).

Angola mendapatkan status barunya sebagai negara merdeka juga (Melber & Saunders, 2007).

Motivasi Finlandia ikut terlibat dalam proses perdamaian di Namibia masih sama seperti kasus Siprus sebelumnya. Bagi Ahtisaari, Finlandia diharapkan agar tetap sebagai negara yang netral dari pengaruh antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang masih mendominasi hubungan internasional. Selain itu ia ingin Finlandia menunjukkan diri bahwa politik luar negeri mereka sudah tidak lagi berfokus pada wilayah Nordic saja, dan menjadi sebuah negara yang memiliki peranan penting dalam berbagai organisasi-organisasi internasional (Soiri & Peltola, 1999).

Keterlibatan Finlandia dalam menengahi konflik di Siprus dan Namibia menjadi salah satu usaha Finlandia untuk membuktikan status netral dan keaktifannya dalam hubungan internasional. Walaupun pada awalnya tindakan *peacemaking* ini ditentang di dalam negeri, karena ditakutkan akan hilangnya status kenetralan Finlandia. Namun keterlibatan Sakari Tuomioja dalam konflik Siprus akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negeri Finlandia selanjutnya untuk menjadi lebih terbuka dan aktif dalam organisasi-organisasi internasional. Karena keberhasilannya menyelesaikan suatu konflik tanpa terpengaruh oleh negara-negara dengan kekuatan besar.

3.2 Kebijakan *Peacemaking* Finlandia Pasca Perang Dingin

Keberhasilan Finlandia dalam menengahi konflik di Siprus dan Namibia membuatnya dipercaya PBB dalam melakukan mediasi konflik lainnya. Namun di

sisi lain, kebijakan luar negeri Finlandia selama Perang Dingin masih memusatkan kepada keterlibatan Finlandia pada *peacekeeping* daripada *peacemaking* dalam mengatasi konflik internasional.

Tercatat kegiatan *peacekeeping* pertamanya adalah pada tahun 1956, ketika Finlandia mengirimkan 250 personil militernya sebagai pasukan penjaga perdamaian di wilayah Gaza yang saat itu terjadi konflik antara Israel dengan Mesir (Global Security, nd). Kemudian dalam konflik perang di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1995, Finlandia mengirimkan 180 personil militernya sebagai pasukan penjaga perdamaian (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2006) dan Mantan Menteri Pertahanan Finlandia Elisabeth Rehn sebagai perwakilan Sekretaris Jenderal PBB dalam Misi Bosnia dan Herzegovina (*United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina / UNMIBH*) dimana ia bertugas untuk memantau dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan *peacekeeping* dan pelanggaran HAM yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina kepada PBB (UN Department of Public Information, 1998). Pada saat perang di Kosovo tahun 1999, Finlandia mengirimkan 400 personil militernya sebagai pasukan penjaga perdamaian (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2006) dan Dokter Forensik Helena Ranta sebagai pengawas Tim Investigasi Forensik dalam menyelidiki kasus korban jiwa di Kosovo akibat konflik perang (Odehnal, 2002). Disusul pada Juli 2003, Mantan Perdana Menteri Finlandia Harri Holkeri terpilih oleh PBB sebagai perwakilan Sekretaris Jenderal PBB dalam Misi Kosovo (*United Nations Interim Administration Mission in Kosovo / UNMIK*) dimana ia bertugas memantau dan

melaporkan setiap perkembangan dari konflik maupun *peacekeeping* kepada PBB (UN, 29 Juli 2003).

Kebijakan luar negeri Finlandia yang memfokuskan secara penuh pada *peacekeeping* berakhir setelah tahun 2003, ketika Presiden Finlandia Tarja Halonen berpidato mengenai perlunya Finlandia memperbarui teknik dalam mendamaikan sebuah konflik. Tarja Halonen menekankan bahwa keadaan internasional telah berubah sepenuhnya dan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian saja tidak cukup untuk mengakhiri sebuah konflik. Bagi Halonen, Finlandia dan PBB harus punya teknik mengakhiri konflik yang bersifat preventif dan lebih manusiawi. Ia juga menyimpulkan bahwa mediasi konflik adalah cara terbaik karena konflik dapat dihindari tanpa melanggar nilai dan norma yang ada di lingkup regional maupun internasional (President of the Republic of Finland, 2003).

Kebijakan luar negeri Finlandia sepenuhnya berubah pada tahun yang sama. Finlandia akan lebih memfokuskan pada *peacemaking* seperti terlibat dalam kegiatan mediasi maupun penggalangan dana untuk mendukung kegiatan mediasi dan mengurangi jumlah keterlibatannya dalam bidang *peacekeeping*. Salah satu upayanya adalah dengan menarik sebagian besar pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di Bosnia dan Herzegovina kembali ke Finlandia (Avramovic, 2003). Hingga laporan terakhir pada tahun 2012, total pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari Finlandia kini hanya berjumlah 200 personil dimana sebelumnya Finlandia memiliki 1000 personil di awal tahun 1990an (Salonius-Pasternak, 2012).

Pada November 2005 Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari ditunjuk oleh PBB sebagai perwakilan Sekretaris Jenderal PBB sekaligus mediator dalam

konflik perang di Kosovo, sebagai tindak lanjut dari *peacekeeping* yang dilakukan Harri Holkeri sebelumnya (UN, 2006)². Dalam menyelesaikan konflik antara Serbia dengan Kosovo, Martti Ahtisaari mengadakan perundingan antara pemerintah Serbia dengan KLA secara rutin dari awal tahun 2006 hingga Maret 2007, dengan lokasinya berada di Vienna, Austria. Dari hasil perundingan-perundingan tersebut, tercapai hasil bahwa Kosovo harus memiliki pemerintahannya sendiri mengingat etnis Albania menjadi mayoritas di wilayah selatan Serbia.

Pada Maret 2007, Ahtisaari merancang program yang dinamakan *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement* dalam rangka mewujudkan pemerintahan khusus untuk Kosovo seperti yang sudah disepakati. Awalnya proposal tersebut ditolak oleh PBB, dikarenakan protes dari Serbia dan Rusia akan isi dari proposal yang memiliki potensi lepasnya Kosovo dari Serbia (Bekaj, 2010) walaupun isi proposal tidak menyebutkan pemerintahan merdeka tersebut berarti lepas pula dari wilayah lamanya (Ahtisaari, 2007). Namun setelah mengadakan perundingan lainnya antara Serbia dengan KLA, akhirnya proposal itu diterima PBB dan Kosovo resmi menjadi negara merdeka pada 17 Februari 2008 (Kim & Woehrel, 2008).

² Perang Kosovo terjadi tahun 1998 hingga 2000, diawali dengan Kosovo yang didominasi oleh etnis Albania menginginkan kemerdekaan dari wilayah Serbia hingga mendirikan *Kosovo Liberation Army* (KLA). Serbia yang saat itu baru saja pulih dari Perang Bosnia dan terpecahnya Yugoslavia pada tahun 1995 pun melancarkan serangan untuk mempertahankan wilayah Kosovo (Bekaj, 2010). Usaha perundingan yang dilakukan oleh PBB antara KLA dengan Serbia sejak tahun 2000 awalnya masih tidak membuahkan hasil final walau sudah cukup menekan jumlah korban rakyat sipil yang tewas akibat perang tersebut (Kim & Woehrel, 2008). Puncak dari Perang Kosovo adalah diketahuinya intervensi NATO yang bekerjasama dengan Serbia dalam melawan KLA dengan melancarkan serangan bom di wilayah penduduk sipil pada 24 Maret hingga 9 Juni 1999 (UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 2000).

Alasan Finlandia mau terlibat dalam menengahi konflik perang di Kosovo karena Finlandia ingin menegakkan nilai dan norma yang dikandung dalam PBB, dimana hal tersebut telah dilanggar oleh Serbia dan NATO dan tidak ada tindakan lebih lanjut dalam memperbaiki perdamaian di Kosovo. Seperti yang diungkapkan oleh Ahtisaari dalam pidatonya pada 13 April 1999, Ahtisaari menyatakan bahwa penyebab konflik Kosovo menjadi sangat kompleks karena munculnya intervensi militer dari NATO yang menyebabkan terjadinya genosida di Kosovo. Hal ini semakin menyulitkan perdamaian antara Serbia dengan Kosovo. Finlandia sebagai negara yang aktif di PBB merasa memiliki kewajiban untuk menyadarkan setiap pihak yang terlibat akan perlunya menegakkan nilai dan norma PBB terlebih dahulu sebelum menangani konflik Kosovo. Salah satu dari norma tersebut adalah menegakkan perdamaian dengan mediasi, bukan dengan menggunakan intervensi militer dari pihak manapun (The President of the Republic of Finland, 2009).

Selain itu Finlandia juga ingin meningkatkan intensitas hubungan diplomatik Finlandia dengan Rusia, yang kemudian terimplementasi setelah Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dapat bekerjasama secara baik dengan Viktor Chernomyrdin selaku perwakilan dari Rusia dalam mediasi konflik perang di Kosovo (Forsberg, 2000).

Finlandia juga berpartisipasi dalam menengahi konflik di wilayah Afrika baik secara *peacekeeping* maupun *peacemaking*, salah satunya adalah Sudan dimana terjadi konflik antara pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak bernama *Sudan Liberation Movement* (SLM) (Ministry for Foreign Affairs of

Finland, 2010)³. Dalam bentuk *peacekeeping*, Finlandia mengirimkan 74 personel pasukan penjaga perdamaian yang ditempatkan di Sudan hingga tahun 2010. Sementara dalam bentuk *peacemaking*, anggota parlemen Finlandia Pekka Haavisto ditunjuk sebagai perwakilan dari Uni Eropa dalam mediasi konflik di Darfur, dengan mempertemukan antara pemerintah Sudan, kelompok-kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement*, *Justice and Equality Movement*, dan *Liberation Justice Movement*, perwakilan dari Amerika Serikat, Inggris, serta Uni Eropa. Proses mediasi berlangsung dari Juli 2005 hingga Mei 2006, dengan setiap bulan sekali diadakan perundingan hingga tercapai hasil kesepakatan (Gya, 2010). Hasil dari perundingan adalah ditandatanganinya *Darfur Peace Agreement* pada Mei 2006, yang berisi tentang gencatan senjata antara kedua belah pihak serta diberikan otonomi untuk masing-masing wilayah tanpa harus lepas dari Sudan (UN, 2006). Namun mediasi dari Finlandia dianggap mengalami kegagalan setelah munculnya protes terhadap *Darfur Peace Agreement* oleh kelompok pemberontak dari wilayah Sudan Timur. Protes tersebut dikarenakan kesalahpahaman akan isi dari perjanjian mengenai otonomi, mengakibatkan terjadinya lagi konflik bersenjata beberapa bulan setelah penandatanganan persetujuan akan perdamaian (Ahmad, 2010, pp. 7-9).

Kegagalan Finlandia pertama kalinya dalam menengahi konflik juga secara tidak langsung membuka alasan Finlandia mau terlibat dalam proses mediasi

³ Konflik bersenjata di Sudan telah lama terjadi sejak merdekanya Sudan dari penjajahan kolonial Inggris pada tahun 1956. Berbagai macam kelompok pemberontak seperti *Sudan National Front* dan *Sudan Liberation Movement* terus berupaya melakukan gerakan separatis kemerdekaan atas dasar perbedaan etnis dan kepentingan politik. Konflik ini masih berlangsung hingga sekarang, dan Darfur menjadi salah satu wilayah di Sudan yang mengalami konflik bersenjata paling parah (Mullenbach, nd).

di Sudan. Berdasarkan susunan kebijakan luar negeri Finlandia di Afrika pada tahun 2009, alasan Finlandia adalah karena ingin memperluas kerjasama ekonomi dan pamor Finlandia sebagai negara yang mampu mempengaruhi kebijakan suatu negara baik dalam maupun luar negeri. Kebijakan yang dimaksud difokuskan pada perihal kesetaraan gender dalam berbagai aspek, investasi luar negeri, serta pengembangan hubungan diplomatik (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2009; Odén, 2011)

Kemudian Finlandia kembali berpartisipasi dalam *peacemaking* pada tahun 2008, ketika terjadi perang antara Georgia dengan Rusia⁴. Pada tahun 2008 hingga 2010, Finlandia mengirimkan Duta Besarnya untuk Uni Eropa Heikki Talvitie dan Menteri Luar Negeri Finlandia Alexander Stubb yang bertugas sebagai mediator dan pengawas dalam mediasi konflik yang melibatkan Georgia, Rusia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat sebagai wakil dari NATO (OSCE, 2008). Kemudian pada tahun 2010, diplomat Finlandia Antti Turunen ditunjuk sebagai perwakilan Sekretaris Jenderal PBB sekaligus mediator tambahan dalam menengahi konflik Georgia (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2010). Hasil dari perundingan yang berjalan sejak tahun 2008 adalah Georgia maupun Rusia tidak akan lagi mengganggu wilayah masing-masing berupa konflik bersenjata, serta wilayah Kaukasus Selatan tetap menjadi milik Rusia (OSCE, 2008). Namun

⁴ Perang Russo-Georgia terjadi pada Agustus 2008, diawali dengan retaknya hubungan diplomatik antara Georgia dan Rusia karena keterlibatan militer Georgia dalam gerakan separatis di wilayah Kaukasus Selatan (Ossetia dan Abkhazia). Dimana Rusia sendiri sedang gencar-gencarnya memberikan bantuan dana kepada wilayah tersebut untuk menghindari lepasnya wilayah Rusia lebih lanjut. Konflik perang pun pecah ketika militer Rusia menyerang wilayah Georgia selama lima hari, setelah Georgia kerap kali melancarkan serangan di wilayah Kaukasus Selatan dan menewaskan warga sipil beserta sebagian besar turis dari Rusia sejak Maret 2008. (Asmus, 2010, pp. 165-214).

mediasi masih berlanjut hingga perundingan terbaru di akhir tahun 2016, dikarenakan permasalahan mengenai penanganan IDP yang berada di Georgia maupun Kaukasus Selatan masih belum ditemukan solusinya (OSCE, 2016).

Alexander Stubb sebagai mediator sekaligus perwakilan dari OSCE memberikan pernyataan melalui pidatonya pada tanggal 25 Agustus 2008 tentang alasan Finlandia mau terlibat dalam mediasi konflik Georgia. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB dan OSCE telah kehilangan nilai dan normanya sebagai organisasi yang mengutamakan perdamaian sehingga tidak dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan konflik. Sehingga Finlandia sebagai negara yang aktif baik di PBB maupun OSCE merasa wajib mengingatkan perlunya menegakkan nilai dan norma perdamaian, serta perlunya memperbarui sistem dan teknik dalam menengahi konflik di masa sekarang (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2008).

Setelah memperlihatkan diri di sejumlah konflik sebagai juru damai dengan mengirimkan sejumlah aktor individu di wilayah konflik baik sebagai mediator maupun pengawas dalam perundingan *peacemaking*, Finlandia pun mendapatkan identitas perannya sebagai *peacemaker* (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2010). Kebijakan luar negeri Finlandia juga mengalami perkembangan baik dari motivasi hingga aksi. Finlandia tidak lagi hanya berfokus mengenai menjaga status netralitas dan keaktifan negara dalam organisasi internasional, namun juga motivasi lainnya seperti menegakkan nilai dan norma dalam PBB atau menjaga hubungan baik dengan negara lain.

3.3 Kebijakan *Peacemaking* Finlandia Setelah 2010

Setelah konflik Georgia dapat diselesaikan, Alexander Stubb selaku Menteri Luar Negeri menyatakan pada Mei 2010 bahwa target Finlandia untuk kedepannya adalah mempertahankan identitas Finlandia sebagai sebuah negara yang terkenal akan aksi perdamaianya (*Rauhanvälityksen Suurvalta*). Dalam mengaktualisasikan identitas itu, Finlandia membuat dua kebijakan luar negeri. Pertama, melakukan penggalangan bantuan dana yang bisa digunakan langsung saat keadaan darurat. Kedua, mendirikan institusi mediator yang berisi negara-negara yang ingin belajar dan memiliki pengalaman dalam *peacemaking* (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2010). Hal ini dibuktikan Finlandia dengan melakukan penggalangan dana dengan total sebesar € 8.550.000, dimana bantuan tersebut masing-masing diberikan kepada Afrika Barat pada tahun 2006 sebesar € 400.000, PBB pada tahun 2010 sebesar € 2.000.000), Uni Afrika pada tahun 2010 sebesar € 3.000.000, Nepal pada tahun 2010 sebesar € 3.000.000, dan Asia Tengah pada tahun 2014 sebesar € 150.000 (**untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran**). Selain itu Finlandia juga telah menggalang dana untuk *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berfokus pada mediasi konflik, seperti *International Crisis Group's Africa* dengan jumlah dana sebesar € 1.250.000, *Crisis Management Initiative* sebesar € 1.500.000 dan *Civilian Crisis Management* sebesar € 400.000 (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2010).

Sementara itu, dalam upaya membentuk institusi mediator, Finlandia bekerjasama dengan Turki mendirikan *Group of Friends of Mediations 2010* dengan anggotanya adalah Norwegia, Swiss dan Finlandia sebagai negara yang

berpengalaman dalam *peacemaking*, serta negara yang masih baru dalam *peacemaking* seperti Indonesia, Brazil dan Turki (Ministry for Foreign Affairs of Finland, nd). Institusi tersebut kini telah beranggotakan 44 negara, dimana *Group Friends of Mediation* memiliki visi untuk mempromosikan dan meningkatkan penggunaan mediasi sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik. Sedangkan misi organisasi tersebut adalah: meningkatkan kesadaran setiap negara bahwa mediasi adalah cara terbaik dalam mencegah konflik yang lebih besar, meningkatkan kesadaran setiap negara bahwa wanita dapat berpartisipasi dalam mediasi konflik, meningkatkan kesadaran setiap negara untuk selalu berpartisipasi dalam proses *peacemaking* hingga suatu konflik berakhir, menyediakan forum untuk berbagi teknik mediasi pada aktor-aktor yang berbeda, mendirikan hubungan antar sesama negara mediator, meningkatkan kooperasi dan koordinasi antara aktor-aktor yang berbeda, meningkatkan kapabilitas mediasi sesuai dengan aturan dari PBB, mempromosikan pembangunan fasilitas yang berhubungan dengan mediasi, mempromosikan pengembangan pedoman atau kode etik mediasi tergantung jenis konflik, mempengaruhi lebih banyak sumber daya untuk mengamankan pendanaan kegiatan mediasi, mendukung pengembangan untuk kemampuan respon peringatan lebih dini, serta menyediakan dukungan politik kepada mediator yang ditunjuk oleh PBB (United Nations, 2014).

Hingga sekarang Finlandia masih terus berupaya untuk tetap aktif terlibat dalam berbagai organisasi internasional yang mengutamakan nilai perdamaian. Selain itu Finlandia juga berupaya untuk tetap aktif dalam melakukan aksi perdamaian di berbagai wilayah konflik baik dalam bentuk mediasi dan

pengawasan, maupun pemberian bantuan dana dalam rangka kegiatan *peacemaking*. Semua hal ini dilakukan agar identitas Finlandia sebagai *Rauhanvälityksen Suurvalta* tetap terjaga dengan baik.

3.4 Kesimpulan

Setelah membahas mengenai sejarah kebijakan luar negeri Finlandia dalam kegiatan *peacemaking* hingga contoh kasus yang melibatkan Finlandia sebagai *peacemaker*, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang bab ini. Pertama, identitas peran Finlandia sebagai *peacemaker* terbentuk dari aktifnya Finlandia dalam melakukan kegiatan *peacemaking* di wilayah-wilayah konflik, dan kegiatan *peacemaking* tersebut dilakukannya secara berulang-ulang. Dimulai dari keberhasilan diplomat Finlandia Sakari Tuomioja menengahi konflik di Siprus pada tahun 1964, hingga pembentukan *Friends of Mediation* yang didirikan oleh Finlandia dan Turki pada tahun 2010. Walaupun *peacemaking* yang dilakukan di Sudan mengalami kegagalan, tetapi usaha Finlandia dalam menengahi konflik tetap berlanjut hingga keberhasilan Finlandia dalam menengahi konflik Perang Russo-Georgia.

Kedua, kebijakan luar negeri Finlandia telah mengalami perkembangan pesat terutama dalam hal keaktifan Finlandia dalam organisasi-organisasi internasional, dimana sebelumnya kebijakan luar maupun dalam negeri Finlandia masih sangat tertutup dengan wilayah luar Nordic. Dikarenakan pengaruh Uni Soviet yang saat itu masih menjadi dominan, walaupun status Finlandia telah sepenuhnya netral terhadap negara-negara dengan kekuatan besar sejak tahun 1948.

Perkembangan kebijakan luar negeri Finlandia yang lainnya adalah motivasi serta aksi-aksi Finlandia yang berhubungan dengan kegiatan *peacemaking*. Motivasi menjaga status netral Finlandia telah berkembang menjadi motivasi menjaga identitas Finlandia sebagai sebuah negara yang terkenal akan aksi perdamaianya. Aksi perdamaian yang awalnya hanya sebatas mediasi dan pengiriman pasukan penjaga perdamaian, telah berkembang dengan menambahkan aksi penggalangan dana dan pendirian institusi *Friends of Mediation* dalam rangka mempromosikan teknik mediasi kepada negara-negara yang tertarik menjadi mediator. Perkembangan dari kebijakan luar negeri Finlandia juga secara tidak langsung membentuk identitas peran Finlandia sebagai *peacemaker* karena aksi menengahi konflik yang dilakukan oleh Finlandia secara berulang-ulang. Meskipun demikian, Finlandia kini dihadapi dengan tantangan berupa Krisis Ukraina antara Uni Eropa dan Ukraina dengan Rusia. Tantangan ini pula akan mempertanyakan apakah Finlandia tetap mempertahankan identitas perannya sebagai *peacemaker* sebagaimana yang telah dipaparkan di Bab 3 ini, dimana pada bab selanjutnya akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.